

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi administrasi diperlukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pada rencana-rencana semula, instruksi-instruksi, sasaran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik, tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Dalam rangka melaksanakan suatu sistem pemerintahan, terutama berjalannya bidang tugas lembaga-lembaga pemerintahan termasuk halnya Pemerintahan di Kabupaten Langkat, maka sangat diperlukan suatu pelaksanaan pengawasan terutama perihal pelaksanaan pengawasan personalia.

Walaupun kebijaksanaan pimpinan di tingkat Pemerintahan Kabupaten

Langkat sudah digariskan secara ideal baik apabila tanpa disertai dengan pengawasan personalia yang baik dan tepat untuk menunjang pelaksanaannya akan menemui kegagalan atau hambatan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka menjadi kewajiban seluruh aparat pemerintahan untuk menghayati pengetahuan bagaimana sebenarnya pengawasan personalia sebaiknya dilakukan agar tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Langkat dapat lancar dan berhasil dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, serta mengingat akan pentingnya pengawasan personalia di dalam suatu organisasi pemerintahan maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang memenuhi syarat dan menerangkan dalam suatu karangan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul yang dapat dirumuskan sebagai berikut : "***Suatu Tinjauan Tentang Pengawasan Personalia Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat***".

## **B. Perumusan Masalah**

Menurut Mohammat Hatta : " Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja. Melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam ".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, ***Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan***, Mutiara, Jakarta, 1980, hal. 14.